

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Dengan falsafah tersebut maka pemerintah menganggap penting adanya sebuah perlindungan dan pemerataan kesejahteraan terhadap tenaga kerja, sehingga tidak hanya dinikmati oleh kaum kapitalis saja. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sifatnya wajib bagi pengusaha yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang tenaga kerja dengan membayar upah sedikitnya Rp.1.000.000,- sebulan (UU Ketenagakerjaan).

Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai resiko yang dialami tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan

Sosial Tenaga Kerja mengatur pemberian jaminan kecelakaan, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Menurut Irham Fahmi,(2012:51) di dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu resiko yaitu :

- Menghindari (*avoidance*)
- Mencegah (*prevention*)
- Memperalihkan (*transfer*)
- Menerima (*assumption or retention*)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi resiko-resiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan manajemen perusahaan untuk menjamin

ketenangan kerja karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja lebih produktif. Akibatnya perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan pada tingkat efektifitas yang tinggi Herman Darmawi,(2013: 64)

Kiprah Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011 (BPJS Ketenagakerjaan).

Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu alternatif yang berikan oleh pemerintah dalam memberikan solusi berkenaan dengan manajemen resiko, sehingga para pekerja bisa mendapatkan sendiri biaya yang dibutuhkan. Biaya itu berasal dari iuran yang dibayarkan setiap bulan. Karena biaya itu berasal dari akumulasi dana yang diiurkan setiap bulan, maka dana itu sesungguhnya adalah hak para pekerja, bukan belas kasihan pihak manapun. Dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, terlihat jelas bahwa yang kaya membantu yang miskin yang muda membantu yang tua dan yang sehat membantu yang sakit.

Kecilnya akumulasi iuran bukan saja akibat banyaknya perusahaan yang belum menjadi peserta, melainkan juga karena kecilnya iuran. Sedang kecilnya iuran berkaitan dengan rendahnya gaji atau upah yang diterima tenaga kerja, serta akibat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha berkaitan dengan pelaporan upah yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tampak pentingnya pelaporan iuran atau upah tenaga kerja terhadap keikutsertaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar dirasa dapat lebih bermanfaat baik bagi tenaga kerja dan dapat merealisasikan visi BUMN. Maka dalam penyusunan laporan ini penulis mengambil judul **“PROSEDUR PELAPORAN PREMI ASURANSI PADA PROGRAM (JHT, JKK, JKM) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PARIAMAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimanakah prosedur pelaporan premi asuransi pada program (JHT, JKK, JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pariaman ?

- Bagaimanakah Unsur Pengendalian Intern yang diterapkan dalam pelaporan premi asuransi pada program (JHT,JKK,JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pariaman ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

- Prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja pada program(JHT, JKK,JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pariaman
- Unsur Pengendalian Intern perusahaan pelaporan premi asuransi pada program (JHT,JKK,JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pariaman

1.3.2. Kegunaan

Disamping memiliki tujuan penelitian ini juga memiliki beberapakegunaan yakni sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang prosedur pelaporan premi yang dalam penulisan ini

disebut sebagai prosedur pelaporan premi tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan

2. Bagi Universitas Andalas

Menambah ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan dan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa tentang prosedur pelaporan premi asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan

1.4. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, metodologi yang penulis gunakan adalah **1.4.1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah data langsung diperoleh dari lapangan dan wawancara dengan pimpinan serta karyawan-karyawan yang terlibat dalam pengambilan data.

1.4.2. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu membandingkan antara teori yang didapat selama diperkuliahan dengan praktek yang ada dilapangan, sehingga berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan saran, serta dapat mengetahui seberapa besar perbedaan terhadap objek yang dibahas.